



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI TENGGARA

BULETIN EDISI IV TAHUN 2026

25 - 30 JANUARI



76TH
HARI BAKTI
IMIGRASI
Imigrasi Berbakti, Indonesia Maju



TINGKATKAN INTEGRITAS DAN KEPEDULIAN LINGKUNGAN, KAKANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA IKUTI RETRET DALAM RANGKA HBI KE-76



Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Ganda Samosir, mengikuti kegiatan Retret Pimpinan Tinggi Imigrasi dalam rangka Rangkaian Peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-76 yang diselenggarakan di Kampus Politeknik Pengayoman Indonesia.

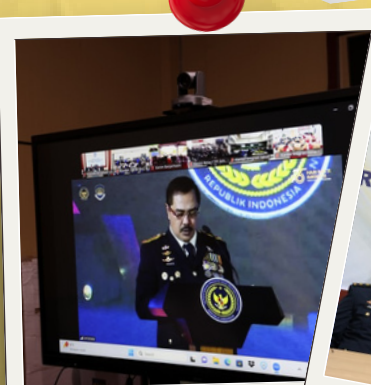
Kegiatan ini dirangkaikan dengan penanaman pohon bersama sebagai wujud komitmen terhadap pelestarian lingkungan, serta makan siang bersama Taruna Poltepin guna mempererat kebersamaan dan sinergi antarpimpinan dan calon aparatur Imigrasi.



Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin memperkuat nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan semangat reformasi birokrasi dalam mewujudkan pelayanan keimigrasian yang prima, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.



PERINGATAN HBI KE-76: KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA GELAR SYUKURAN SECARA VIRTUAL



Kendari – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi (HBI) Ke-76 Tahun 2026, jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan Syukuran yang berlangsung khidmat di Ruang Aula pada Senin pagi (26/01).

Kegiatan ini dilaksanakan secara terpusat melalui sambungan virtual, menghubungkan jajaran pusat dengan seluruh wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia. Meski dilaksanakan dalam format syukuran di lingkungan kantor, suasana tetap berlangsung penuh makna tanpa mengurangi esensi dari hari bersejarah bagi insan Imigrasi.

Kegiatan ini diikuti oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Benny Setiawan, serta para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan JFU Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra. Kehadiran seluruh jajaran ini menjadi cerminan bentuk integritas dan kesiapan dalam menjalankan tugas negara. Momentum ini menjadi ajang refleksi untuk terus memperkuat peran Imigrasi dalam pelayanan masyarakat serta penegakan hukum di wilayah Sulawesi Tenggara.



SINERGI IMIGRASI SULTRA & UHO: TINGKATKAN LITERASI & SDM MAHASISWA



KENDARI – Kakanwil Ditjen Imigrasi Sultra, Ganda Samosir, menyambangi Plt. Rektor UHO, Dr. Herman, Rabu (28/1/2026). Pertemuan ini membahas kolaborasi strategis demi mahasiswa UHO yang lebih melek hukum keimigrasian.



Poin Penting Pembahasan pada pertemuan ini adalah Immigration Goes to Campus: Edukasi aturan izin tinggal & pencegahan TPPO (Perdagangan Orang) berkedok magang. Eazy Passport Layanan pembuatan paspor kolektif yang memudahkan civitas akademika. Peluang Magang Dukungan program MBKM bagi mahasiswa di lingkungan Imigrasi Sultra.

Plt. Rektor UHO menyambut hangat inisiatif ini sebagai bekal penting bagi alumni yang ingin berkarier atau lanjut studi ke luar negeri secara legal dan aman.

PENGUATAN KUALITAS LAYANAN KEIMIGRASIAN DI WILAYAH KABUPATEN KOLAKA



KOLAKA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Ganda Samosir beserta jajaran dan perwakilan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari melaksanakan kegiatan peninjauan lapangan di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kendari di Kolaka, Jumat (30/01).

Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan seluruh aspek operasional, mulai dari sarana prasarana hingga sistem pelayanan publik, berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.



Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil Ditjen Imigrasi Sultra turut didampingi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kolaka, Salamansyah. Kehadiran pihak Pemerintah Daerah menunjukkan sinergi dan kolaborasi yang solid dalam mendukung keberadaan UKK Imigrasi Kendari di Kabupaten Kolaka guna memudahkan akses layanan keimigrasian bagi masyarakat setempat.

Melalui peninjauan ini, diharapkan UKK Imigrasi Kendari di Kolaka dapat terus meningkatkan performa layanan dan memperkuat fungsi pengawasan keimigrasian di wilayah kerja terkait.

PERKUAT PENGAWASAN TKA, IMIGRASI SULTRA GELAR KOORDINASI STRATEGIS DENGAN DISNAKERTRANS KOLAKA

KOLAKA – Dalam upaya memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing, jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara melakukan langkah proaktif dengan menyambangi Kabupaten Kolaka.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sultra, Ganda Samosir, memimpin langsung kunjungan koordinasi strategis ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kolaka. Kunjungan ini disambut langsung oleh Plt. Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Kolaka, Saritomo, S.Pd.

Pertemuan antara dua instansi ini menitikberatkan pada pembahasan langkah-langkah preventif dan kolaboratif dalam memantau Tenaga Kerja Asing (TKA), khususnya di sektor industri yang cukup masif di wilayah Kolaka.

Ganda Samosir menegaskan bahwa sinergi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan hukum secara menyeluruh. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut meliputi:

- Validitas Dokumen: Memastikan seluruh TKA mengantongi dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku.
- Izin Kerja: Verifikasi kesesuaian izin kerja dengan aktivitas riil TKA di lapangan sesuai regulasi ketenagakerjaan Indonesia.
- Deteksi Dini: Penguatan pertukaran informasi antara Imigrasi dan Disnakertrans untuk mendeteksi potensi pelanggaran lebih awal.

Plt. Kadis Nakertrans Kab. Kolaka, Saritomo, S.Pd., mengapresiasi langkah jemput bola yang dilakukan oleh jajaran Imigrasi Sultra. Ia menegaskan kesiapan pihaknya untuk bekerja sama secara intensif guna menciptakan iklim investasi yang kondusif namun tetap taat aturan.



Kolaborasi antara otoritas imigrasi dan ketenagakerjaan ini dinilai sebagai kunci vital dalam menjaga kedaulatan negara serta memelihara ketertiban hukum (kamtibhum) di wilayah Sulawesi Tenggara. Dengan pengawasan yang ketat namun terukur, diharapkan kehadiran TKA dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.